

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada 20 April 2011 Kabupaten Bandung genap berusia 370 tahun. Berdasarkan bukti sejarah, Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram tanggal 20 April tahun 1641. Berdasarkan hal itu, tanggal 20 April ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Bupati pertama Kabupaten Bandung adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681). Bupati berikutnya Tumenggung Nyili (salah seorang putra Tumenggung Wiraangunangun). Namun, Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang abdi dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681-1704.

Selanjutnya, kedudukan Bupati Bandung dari R Ardikusumah diserahkan kepada putranya R Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R Ardisuta (1704-1747), bupati berikutnya adalah Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747), ia merupakan putra tertua dari R Ardisuta.

Perkembangan selanjutnya, pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada

masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuh Kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun-Alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels, pada 25 Mei 1810 dengan alasan karena daerah baru itu dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Pada masa pemerintahan Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874), Ibukota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut *Negorij Bandoeng*. Tahun 1850 dia mendirikan Pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung.

Di masa pemerintahan R Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk, tepatnya 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api itu, Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi saja, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di ibukota. Dampaknya perekonomian Kota Bandung makin maju. Setelah R Adipati Kusumahdilaga wafat, sebagai penggantinya RAA Martanegara. Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai

Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama dua periode, pertama tahun 1912-1931 sebagai Bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935-1945 sebagai Bupati yang ke-14. Pada periode 1931-1935, RT Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke-13. Selanjutnya pejabat Bupati ke-15, adalah RTE Suriaputra (1945-1947) dan penggantinya adalah RTM Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke-17. Ia hanya menjabat selama satu tahun (1956-1957).

Bupati berikutnya adalah Letkol R Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Selanjutnya, pada masa Pimpinan Kolonel RH Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah. Peletakan batu pertamanya pada 20 April 1974, bertepatan Hari Jadi ke-333 Kabupaten Bandung. Rencana kepindahan ibukota ini berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R Sani Lupias Abdurachman (1980-1985).

Atas pertimbangan secara fisik, geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika

jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985- 1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru, yaitu ke Kecamatan Soreang. Di pinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran. Di tempat tersebut di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya, yaitu Kolonel HU Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun 1990-1992.

Pada 5 Desember 2000, Kolonel H Obar Sobarna terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dan wakilnya Drs H Eliyadi Agraraharja. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan. Tahun 2003 semua aparat daerah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung.

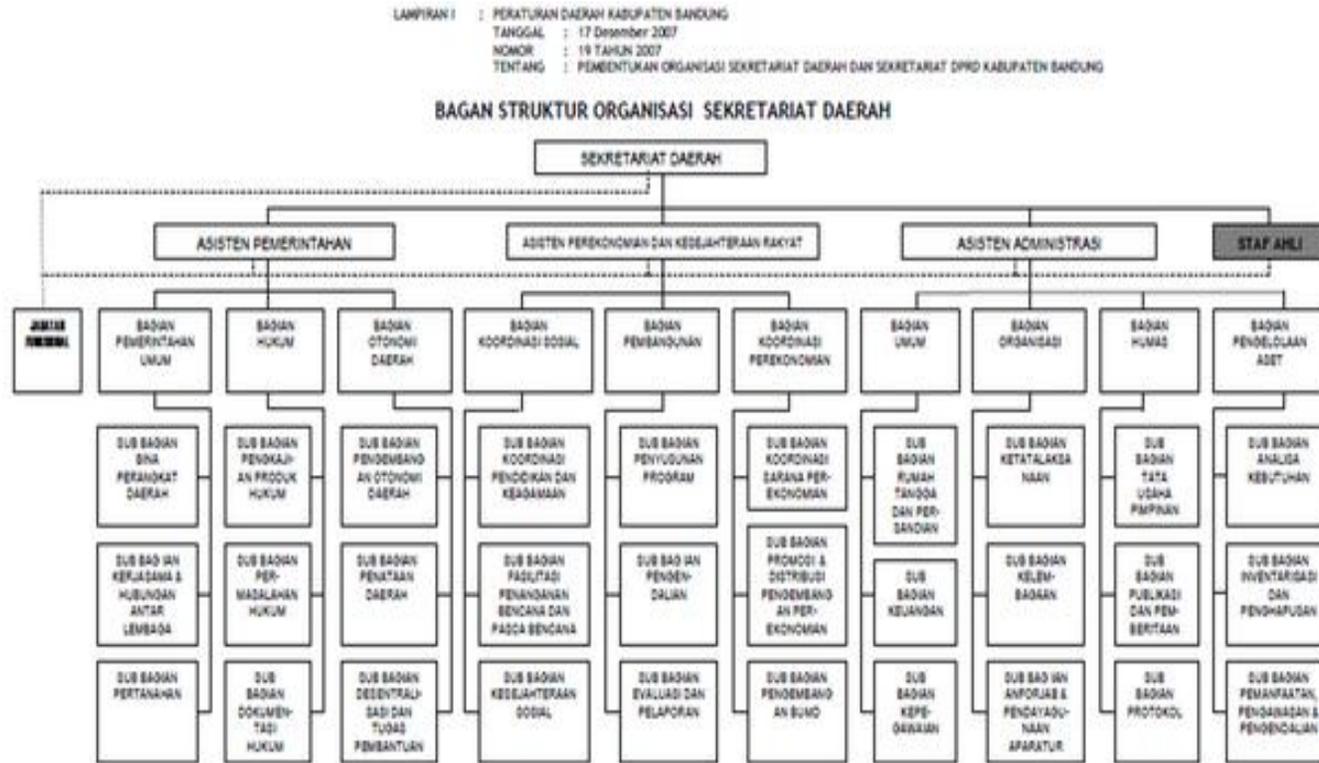
Tanggal 5 Desember 2005. H Obar Sobarna menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya dan didampingi oleh H Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati. Di masa pemerintahan H Obar Sobarna, berbagai pembangunan infrastruktur mengalami kemajuan signifikan. Paling tidak, dibangun Stadion Olahraga si Jalak Harupat. Stadion ini merupakan stadion yang bertaraf internasional dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Stadion itu kini sering digunakan menjadi tempat pertandingan sepakbola tingkat nasional, yaitu Liga Super Indonesia.

Selain itu, dirintis dan dibangun pula beberapa jembatan. Salah satunya jembatan yang menghubungkan daerah pameunteusan dan Cicukang (Taman Kopo Indah/TKI). Sekaligus membuka akses jalan Pameuntasan (Soreang)-Caringin, sebagai jalan alternatif menuju Kota Bandung (mengurangi kemacetan di daerah Sayati dan Kopo).

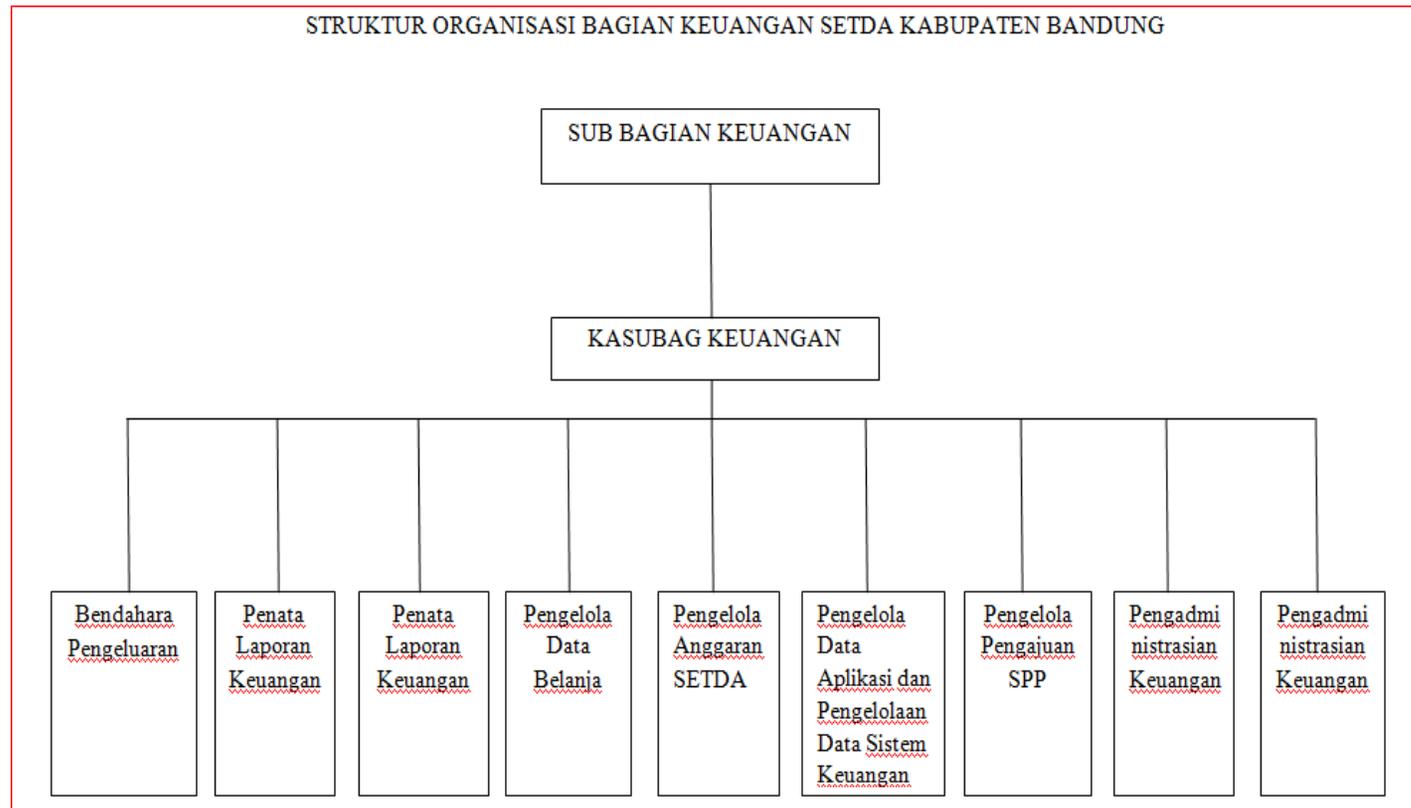
Pada masa H Obar Sobarna pula terbentuk kabupaten Bandung Barat sebagai pemekaran dari kabupaten Bandung. Hal itu didasari aspirasi dan dinamika masyarakat yang didukung hasil penelitian dan pengkajian dari lima perguruan tinggi. Kabupaten Bandung Barat secara yuridis terbentuk bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.

Jabatan Bupati H Obar Sobarna berakhir tahun 2010, selanjutnya dipegang oleh Dadang Nasser dengan wakilnya Deden Rukman Rumaji melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan baru di Pemda Bandung ini, diharapkan muncul pula karya terbaik dalam lembaran sejarah Kabupaten Bandung yang akan ditulis dengan “tinta emas”.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai SKPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan selaku unsur staf pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Sekretaris Daerah didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Administrasi. Struktur jabatan pada bagian keuangan SETDA Kab.Bandung sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 32 Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.
- d. Pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi pengumpulan dan penyusunan usulan, perubahan dan perhitungan anggaran.
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .
- h. Pelaksanaan koordinasiteknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Intansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan.

1. Bendahara Pengeluaran

Ferry Novandi Sadikin, S.E

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, mentausahkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

2. Penatausahaan Keuangan

- a. Penatausahaan Belanja Langsung

Yati Kurniati, S.E

Penatusahaan Keuangan bertugas membuat dan mencatat laporan keuangan belanja langsung Sekretariat Daerah Kab.Bandung.

- b. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung

Rizal Effendi, S.E

Penatausahaan Keuangan bertugas membuat dan mencatat laporan keuangan belanja tidak langsung Sekretariat Daerah Kab.Bandung.

3. Pengelola Data Belanja dan Pengelola Laporan Keuangan

Raden kaniawati, S.E

Pengelola Data Belanja dan Pengelola Laporan Keuangan bertugas Mencatat data belanja yang telah disusun oleh penatausahaan keuangan dan mencatat laporan keuangan yang telah disusun.penatausahaan keuangan.

4. Pengelola Anggaran Sekretariat Daerah

Irwan Sopian

Pengelola Anggaran Sekretariat Daerah bertugas untuk mengelola anggaran langsung dan tidak langsung Sekretariat Daerah.

5. Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan data Sistem Keuangan

Asep Muslim,S.E

Penginputan atau pengolahan data belanja dan laporan keuangan kedalam sebuah sistem yaitu SIMDA.

6. Pengelolaan Pengajuan SPP

Herlina

Pengelolaan Pengajuan SPP bertugas mencatat pengajuan SPP dan SPM Sekretariat Daerah kedalam buku register.

7. Pengadministrasian Keuangan

a. Pengadministrasian Keuangan Tidak Langsung

Nana Kusnadi

- Pengadministrasian Keuangan Tidak Langsung bertugas untuk mencatat dan menerima nota belanja tidak langsung kedalam buku register berupa surat masuk atau keluar.
- Menyusun hasil laporan kedalam buku arsip.

b. Pengadministrasian Keuangan Langsung

Nanang Koswara

Pengadministrasian Keuangan Langsung bertugas untuk mencatat dan menerima nota belanja langsung kedalam buku register berupa surat masuk atau keluar.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa pada paragraf 3 tentang tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.